

EVALUASI RENCANA KERJA PEMBANGUNAN KENAGARIAN INDERAPURA TENGAH KECAMATAN PANCUNG SOAL KABUPATEN PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATRA BARAT

Oleh

Defrizon Indra dan Zulkifli

Mahasiswa dan Dosen Program Studi Administrasi Publik Fisipol UIR

ABSTRACT

This study aims to determine the level of evaluation plans Kenagarian Work Development in Central Indrapura, where the Development Plan is measured by four indicators, namely: Inputs, Process, Outputs and Outcomes. Type of Research located in Kenagarian Indrapura middle of the District of beheading Problem Pesisir Selatan regency of West Sumatra Province is survey descriptive, namely the priority list of the questionnaire as a data collection tool and data collected by the tool is then used as the main raw material for evaluating the condition of Empirical of objectivity where the destination research at the location studied. There are 3 groups of the population and sample in this research is employees 7, Bamus 5 people, and Society 10. Sampling technique used in data collection is the census technique for employees and Bamus, type and data collection techniques used consist of primary data was collected by using questionnaires and interviews and secondary data was collected using observation. While data analysis technique used is to use tools frequency table. Based on this analysis technique researchers assess and concluded that the Development Plan Evaluation Kenagarian Middle Indrapura districts beheading Problem Pesisir Selatan regency of West Sumatra province are in Interval Good.

Keywords : Evaluation, Development Plan

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat Evaluasi rencana Kerja Pembangunan di kenagarian Indrapura Tengah, dimana Rencana Kerja Pembangunan diukur dengan 4 Indikator yaitu : Input, Proses, Outputs dan Outcomes. Tipe Penelitian yang berlokasi di Kenagarian Indrapura tengah Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatra Barat ini adalah survey Deskriptif, yaitu memprioritaskan daftar kuisioner sebagai alat pengumpulan data dan data yang terkumpul dengan alat ini kemudian dijadikan bahan baku utama untuk mengEvaluasi kondisi Empiris dari obyektivitas keberadaan tujuan penelitian pada lokasi yang diteliti. Terdapat 3 kelompok populasi dan sampel pada penelitian ini yaitu pegawai 7 orang, BAMUS 5 orang, dan Masyarakat 10 orang. Teknik Penarikan Sampel yang dipergunakan dalam pengumpulan data adalah teknik sensus untuk pegawai dan BAMUS, jenis dan teknik pengumpulan data yang digunakan terdiri dari, data primer, dikumpulkan dengan teknik kuisioner, dan wawancara serta data sekunder yang dikumpulkan menggunakan teknik observasi. Sementara teknik analisis data yang dipergunakan adalah dengan mempergunakan alat bantu tabel frekuensi. Berdasarkan teknik analisis ini peneliti menilai dan menyimpulkan bahwa tingkat Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Kenagarian Indrapura Tengah kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatra Barat berada pada Interval Cukup Baik.

Kata Kunci : Evaluasi, Rencana Kerja Pembangunan

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Nagari merupakan bentuk organisasi kehidupan masyarakat desa dalam sistem

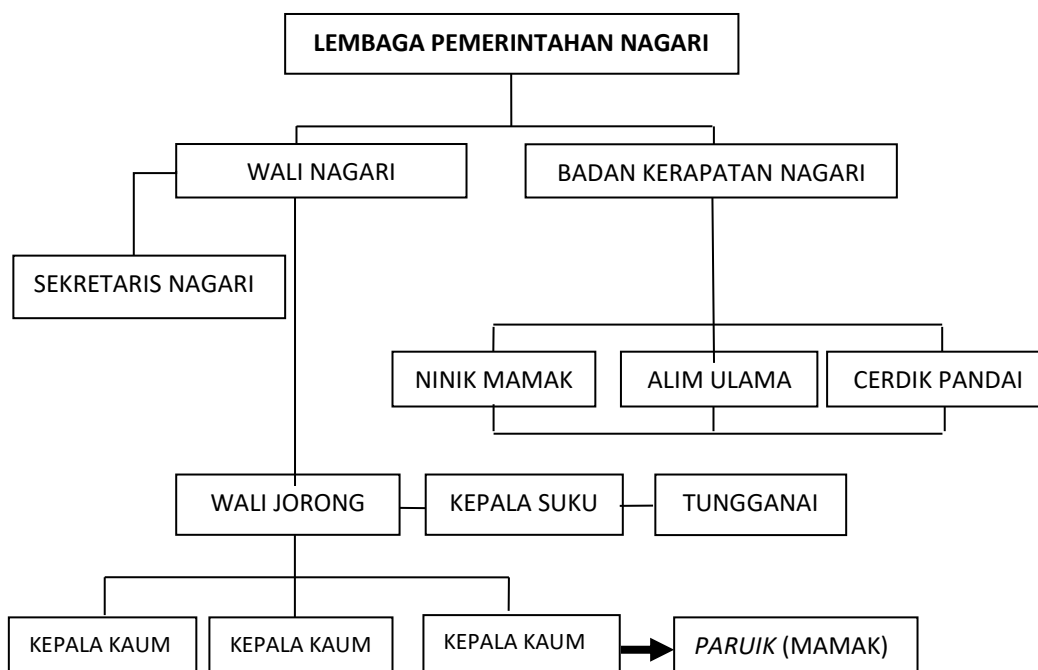
pemerintahan desa yang berlaku didaerah sumatra barat. Nagari disini merupakan

unit pemerintahan terendah dibawah kecamatan, dan juga merupakan kesatuan wilayah, kesatuan adat, dan sekaligus kesatuan administrasi pemerintahan. nagari juga diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum adat yang mempunyai wilayah dengan batas-batasnya tertentu, mempunyai harta benda kekayaan sendiri, berwenang mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Secara Struktural, Pemerintahan nagari adalah penyelenggara urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh

pemerintah nagari yang dipimpin oleh wali nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari (BAMUS Nagari). di Minangkabau memiliki sistem nilai yang dikenal dengan *universalisme budaya*, yaitu memberi tempat “keterbukaan” atau unsur *inklusifisme* di dalam jantung budaya Alam Minangkabau. Dalam arti kata lain, adat dan budaya Minangkabau didesain tidak dalam bentuk statis, melainkan dinamis, seperti termaktub dalam pepatah *nan elok dipakai, nan buruak dibuang* (yang baik dipakai, yang buruk dibuang).

Gambar 1 : Gambar Bagan Sistem Pemerintahan Nagari Didaerah Sumatra Barat.



Sumber : Buku Nagari Minang Kabau dan Desa di Sumatra barat, 2008

Pada Sistem pemerintahan nagari tidak berlaku sistem "top down" yang mengikuti instruksi dari atas, akan tetapi Sistem pemerintahan waktu itu adalah berawal dari anak nagari setempat yang lebih memahami apa saja permasalahan & hal yang diperlukan dalam memajukan nagarinya mambasuik dari bumi (bottom

up) yang mengikuti intruksi dari bawah dengan sistem musyawarah.

Didalam melaksanakan tugas dan fungsi pemerintah nagari di kabupaten pesisir selatan juga diatur didalam peraturan daerah pesisir selatan no.0n 8 tahun 2007 menjelaskan beberapa kewenangan wali nagari dan kewajiban

pemerintah nagari seperti pada pasal 12 no.3 yaitu :

1. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Nagari berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Bamus Nagari;
2. Mengajukan rancangan Peraturan Nagari;
3. Menetapkan Peraturan Nagari yang telah mendapatkan persetujuan bersama Bamus Nagari;
4. Menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Nagari mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari untuk dibahas dan ditetapkan bersama Bamus Nagari;
5. Membina kehidupan masyarakat nagari;
6. Membina perekonomian nagari;
7. Mengkoordinasikan pembangunan nagari secara partisipatif dan menumbuh kembangkan semangat kegotong-royongan masyarakat nagari;
8. Mewakili nagarinya di dalam dan di luar Pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum sesuai peraturan perundang-undangan; dan
9. Melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Adanya gejala-gejala yang menunjukkan bahwa didalam merumuskan sebuah rencana kerja pembangunan di kenagarian indrapura tengah kecamatan pancung soal ini masih belum terlaksana dengan baik. Adapun gejala-gejala tersebut adalah :

1. Tidak berjalannya sistem koordinasi antar kelembagaan kenagarian, seperti pemerintah nagari dan BAMUS
2. Inderapura tengah, seperti kurang disiplin dan kurangnya diadakan rapat koordinasi antar kelembagaan pemerintahan nagari

3. Kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat dalam meningkatkan kebutuhan dan pemanfaatan sumber daya alam, seperti perumusan Rencana Kerja Pembangunan jarang sekali mengikutsertakan masyarakat
4. Belum adanya keberanian pemerintah nagari dalam pengelolaan sumber daya alam, seperti belum terlaksananya pembuatan badan usaha milik nagari (BUM Nagari)

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan diatas adapun tujuan penulisan adalah Untuk mengetahui, menganalisis dan menjelaskan bagaimana evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Kenagarian Inderapura Tengah Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan provinsi Sumatra Barat.

Kegunaan Penelitian

1. Guna teoritis, yakni penelitian diharapkan dapat memacu perkembangan ilmu administrasi negara, minimal dapat memperkaya inventaris hasil-hasil penelitian dibidang administrasi, khususnya dibidang ilmu manajemen
2. Guna akademis, yakni penelitian ini diharapkan menjadi bahan informasi dan data sekunder bagi kalangan akademis yang ingin meneliti hal yang sama.
3. Guna praktis, ialah penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan bagi Pejabat Struktural pada Pemerintah kenagarian indrapura tengah kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan provinsi Sumatra Barat dalam melakukan perumusan Rencana Kerja Pembangunan

STUDI KEPUSTAKAAN

Konsep Administrasi

Seperti yang dikatakan oleh Siagian (2003;2) dalam bukunya bahwa administrasi tersebut didefinisikan sebagai keseluruhan proses kerja sama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Disamping itu, dalam pengertian luas administrasi bisa dilihat dari 3 sudut pandang, sehingga menghasilkan 3 pengertian menurut sudut pandangnya masing-masing oleh Anggara (2012;20) yaitu :

- a. Dari sudut proses, administrasi merupakan keseluruhan proses pemikiran, pengaturan, penentuan tujuan hingga pelaksanaan kerja sehingga tujuan yang dimaksudkan tercapai.
- b. Dari sudut fungsi, administrasi merupakan keseluruhan aktivitas yang secara sadar dilakukan oleh setiap orang atau sekelompok orang yang berfungsi sebagai administrator atau pemimpin. Dalam kegiatan tersebut terdapat berbagai macam tugas (fungsi) kerja, misalnya tugas perencanaan, tugas mengorganisasi, tugas menggerakkan, tugas mengawasi, dan sebagainya.
- c. Dari sudut pandang kelembagaan, administrasi ditinjau dari manusia-manusia, baik secara perseorangan maupun kolektif yang menjalankan kegiatan-kegiatan guna mencapai hasil, sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan

Konsep Manajemen

Manajemen menurut Siagian (2008;5) bisa didefinisikan dari dua sudut pandang, yaitu sebagai proses penyelenggaraan berbagai kegiatan

dalam rangka penerapan tujuan dan sebagai kemampuan atau keterampilan orang yang menduduki jabatan manajerial untuk memperoleh sesuatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain.

Selain itu, manajemen juga bisa didefinisikan dalam 3 perspektif menurut Riva'i dkk (2013;177).

- a. Menurut perspektif proses, manajemen adalah proses pencapaian tujuan melalui kegiatan orang lain, dimana kegiatan diawasi dan diselenggarakan.
- b. Definisi dari perspektif kolektivitas orang, dari sudut ini manajemen diartikan sebagai kolektivitas orang yang melaksanakan pekerjaan-pekerjaan manajerial.
- c. Pengertian manajemen menurut perspektif seni dan ilmu. Manajemen sebagai seni merupakan pengimplementasian dari keterampilan-keterampilan dalam pengelolaan organisasi berdasarkan pengalaman-pengalaman yang ada dan bermanfaat. Sementara itu, manajemen sebagai ilmu terlihat dari penerapannya terhadap proses mengobservasi, mengumpulkan, dan menganalisis data, fenomena-fenomena, kejadian-kejadian, dan lain-lain kemudian diambil beberapa kesimpulan yang mendukung tujuan yang hendak dicapai.

Konsep Kebijakan Publik

Secara umum, istilah "kebijakan" digunakan untuk menunjukkan perilaku seorang aktor dalam suatu bidang tertentu. James E. Anderson dalam dwiyanto indiahno (2009;17) mendefinisikan kebijakan adalah perilaku dari sejumlah aktor (pejabat, kelompok, instansi pemerintah) atau serangkaian aktor dalam suatu bidang kegiatan

tertentu. Pengertian kebijakan seperti ini menjadi kurang memadai untuk pembicaraan-pembicaraan yang lebih bersifat ilmiah dan sistematis menyangkut analisis kebijakan publik. Oleh karena itu, kita memerlukan batasan atau konsep kebijakan publik yang lebih tepat.

Proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. Oleh karena itu Charles linblom dalam budi winarno (2002;35) menjelaskan ada 5 indikator didalam pembuatan sebuah kebijakan publik, diantaranya:

1. Perumusan masalah (Penyusunan Agenda)
2. Memberikan informasi mengenai kondisi-kondisi yang menimbulkan masalah.
3. *Forecating* (Formulasi kebijakan)
4. Memberikan informasi mengenai konsekuensi dimasa mendatang dari diterapkannya alternatif kebijakan termasuk apabila membuat kebijakan.
5. Rekomendasi kebijakan (Adopsi kebijakan)
6. Memberikan informasi mengenai manfaat bersih dari setiap alternatif dan merekomendasikan alternatif kebijakan yang memberikan manfaat bersih paling tinggi.
7. *Monitoring* kebijakan (Implementasi kebijakan)
8. Memberikan informasi mengenai konsekuensi sekarang dan masa lalu

dari diterapkannya alternatif kebijakan termasuk kendala-kendalanya.

9. *Evaluasi* kebijakan (penilaian kebijakan)

Memberikan informasi mengenai kinerja atau hasil dari suatu kebijakan.

Konsep Evaluasi

Evaluasi adalah suatu usaha untuk mengukur dan sumber nilai secara objektif dari pencapaian hasil-hasil yang direncanakan sebelumnya, dimana hasil evaluasi tersebut dimaksudkan menjadi umpan balik untuk perencanaan yang akan dilakukan di depan (Yusuf, 2000: 3).

Evaluasi kebijakan adalah penilaian secara menyeluruh input, proses, outputs, dan outcomes. Evaluasi memiliki empat tipe menurut finance (1994;4 dalam bajuri dan yuwono; 2002:135)

- a. Evaluasi kecocokan (*appropriatennes*)
- b. Melakukan penilaian terhadap kebijakan yang ditetapkan tersebut apakah cocok untuk dipertahankan atau perlukah diganti dengan kebijakan lain.
- c. Evaluasi efektivitas
- d. Melakukan penilaian apakah kebijakan yang dilaksanakan tersebut telah menghasilkan hasil dan dampak yang sesuai dengan tujuannya.
- e. Efalulasi efesiensi
- f. Melakukan penilaian berdasarkan tolak ukur ekonomis
- g. Efalulasi meta
- h. Melakukan penilaian terhadap proses evaluasi itu sendiri

Operasional Variabel

Tabel 1 : Tabel Operasional Variabel Penelitian Evaluasi Rencana Kerja (RKP) Kenagarian Inderapura Tengah kec.Pancung Soal Kab.Pesisir Selatan

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator	Skala Pengukuran
Evaluasi kebijakan menurut finance (1994:4 dalam bajuri dan yuwono; 2002:135) adalah penilaian secara menyeluruh input, proses, outputs, dan outcomes.	Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan	1. <i>Input</i>	1. Sumber daya pendukung (SDM,Uang,Sarana/prasarana) 2. Bahan-bahan dasar pendukung (peralatan,teknologi)	Baik Cukup Baik Kurang Baik
		2. <i>proses</i>	1. Tepat sasaran atau tidak 2. Tepat guna atau tidak 3. Efisiensi atau tidak	Baik Cukup Baik Kurang Baik
		3. <i>Outputs</i>	1. Tepat tidaknya sasaran yang dituju 2. Berapa besar sasaran yang tercakup 3. Seberapa banyak kelompok sasaran yang tertangani 4. Seberapa besar kelompok yang terlibat	Baik Cukup Baik Kurang Baik
		4. <i>Outcume</i>	1. Ada atau tidak perubahan pada target/sasaran 2. Seberapa besar perubahan kelompok sasaran 3. Seberapa signifikan perubahan yang terjadi pada kelompok sasaran dibandingkan dengan tujuan yang ingin dicapai.	Baik Cukup Baik Kurang Baik

Sumber : Modifikasi penulis, 2016

Teknik Pengukuran

Baik : Apabila penilaian terhadap Evaluasi Rencana Kerja (RKP) Kenagarian Inderapura Tengah 67-100%

Cukup Baik : Apabila penilaian terhadap Evaluasi Rencana Kerja (RKP) Kenagarian Inderapura Tengah 34-66%

Kurang Baik : Apabila penilaian terhadap Evaluasi Rencana Kerja (RKP) Kenagarian Inderapura Tengah 1-33%

METODE PENELITIAN

Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah tipe survey deskriptif. Karena peneliti bermaksud memberikan hasil analisa dan informasi yang detail terhadap objek penelitian. Dan itu dilakukan dengan mengumpulkan data dari sampel yang akan mewakili populasi, sehingga akan diperoleh penggambaran yang sangat jelas dari hasil analisisnya.

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti adalah Kenagarian Inderapura Tengah kecamatan.Pancung

Populasi dan Sampel

Adapun yang akan dijadikan populasi oleh peneliti adalah 1 orang Wali Nagari, 1 orang sekretaris kenagarian inderapura tengah, 2 orang kepala kampung, 10 orang Badan Musyawarah Nagari (Bamus), dan, 50 masyarakat (KK) kenagarian inderapura tengah . Jika ditotal jumlah populasi adalah 64 orang.

Sampel menurut Sugiyono (2012; 81) adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. sampel yang diambil dari populasi juga harus representative (mewakili). Karena jika tidak representative, maka ibarat orang buta disuruh menyimpulkan karakteristik gajah.

Adapun yang menjadi sampel untuk penelitian kali ini adalah berjumlah 22 orang yg terdiri dari 1 wali nagari, 1 sekretaris kenagarian inderapura tengah, 2 kepala kampung, 5 anggota BAMUS, 5 dan 10 masyarakat (KK)

Tabel 2 : Tabel Populasi dan Sampel Penelitian Evaluasi rencana Kerja pembangunan (RKP) kenagarian Inderapura Tengah Kec.Pancung Soal Kab.Pesisir Selatan.

No	Keterangan	Populasi	Sampel	Persentase
1	Wali nagari	1	1	100 %
2	Sekretaris kenagarian	1	1	100 %
4	Kaur	3	3	100 %
5	Kepala kampung	2	2	100%
6	Badan permuswaratan Nagari (BAMUS)	10	5	50%
7	Masyarakat (KK)	50	10	10%
	jumlah	64	22	0

Sumber : Data Olahan Penulis 2016

Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Data Primer merupakan data utama yang diperoleh langsung dari wali nagari, anggota BAMUS, serta

masyarakat kenagarian Inderapura Tengah. Adapun data yang diperoleh adalah mengenai Tingkat evaluasi rencana kerja pembangunan (RKP) kenagarian Inderapura Tengah kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat, baik dari sisi perumusan kebijakan ataupun pengawasan terhadap perumusan Rencana kerja pembangunan, dan dari sisi indikator lainnya.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data dan informasi dan keterangan dari organisasi yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu Pemerintahan kenagarian inderapura tengah. Data pelengkap yang diperoleh secara tidak langsung dari berbagai sumber yang tersedia dilokasi penelitian dan sudah dipublikasikan. Data ini berupa arsip literatur yang berhubungan langsung dengan penelitian ini seperti Struktur organisasi kenagarian inderapura tengah dan RPJM 2013-2017 inderapura tengah.

Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan terhadap objek penelitian

2. Wawancara (Interview)

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab oleh peneliti kepada responden. Teknik ini dilakukan agar informasi yang didapatkan oleh peneliti lebih jelas dan akurat serta mendalam. Dan kemudian, teknik ini juga sangat bermanfaat jika diterapkan pada informan atau orang atau responden yang dianggap banyak tau tentang apa yang sedang diteliti oleh peneliti.

3. Angket/ Kuisisioner

Kuisisioner adalah teknik pengumpulan data dengan cara memberi pertanyaan tertulis pada responden.

4. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan fasilitas untuk mengabadikan sebuah momen. Baik foto, rekaman, dan lain-lain.

PEMBAHASAN

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Nagari (RKP- Nagari) pemerintah kenagarian inderapura tengah (Studi Evaluasi)

Evaluasi kebijakan pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Nagari (RKP Nagari) Sangat perlu dilakukan, sehingga proses pencapaian dari perumusan Rencana Kerja Pembangunan Nagari (RKP Nagari) bisa diketahui tingkat keberhasilan dari kebijakan yang dirumuskan. Mulai dari tahap pengkajian, perumusan sampai pelaksanaannya akan terlihat sejauh mana tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan (RKP Nagari) tercapai dengan efektif dan efisien.

1. Input

Ada beberapa komponen tertentu yang selalu ditemukan dalam setiap melakukan evaluasi kebijakan, yaitu tujuan dan metode didalam mengevaluasi sebuah kebijakan . Walaupun perencanaan yang baik itu tidak menjadi jaminan untuk keberhasilan sebuah kebijakan yang efektif, perencanaan yang buruk selalu akan berdampak terhadap pencapaian hasil sebuah kebijakan. Waktu dan sumberdaya yang dikerahkan untuk perencanaan yang seksama dalam melakukan evaluasi perencanaan sebuah kebijakan itu sangat berharga.

Tabel 3 : Distribusi Tanggapan Responden pegawai Mengenai Indikator Input (masukan) terhadap Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Kenagarian InderaPura Tengah Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat

No	Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Sumber daya manusia atau pegawai yang ada dikantor pemerintah kenagarian indrapura tengah	4 (57,15%)	2 (28,57%)	1 (14,28)	7
2	Tingkat pendidikan para pegawai yang ada dikantor pemerintah kenagarian indrapura tengah	2 (28,57%)	3 (42,86%)	2 (28,57%)	7
3	penempatan pegawai didalam struktur organisasi	2 (28,57%)	4 (57,15)	1 (14,28%)	7
4	pengaruh tingkat pendidikan pegawai terhadap perumusan Rencana Kerja Pembangunan	5 (71,42%)	2 (28,57%)	0 (%)	7
5	mekanisme didalam pemilihan anggota Tim Perumus RKP	1 (14,28%)	6 (85,71)	0 (%)	7
6	Sumber pendanaan dalam melaksanakan Rencana Kerja pembangunan (RKP)	1 (14,28%)	5 (71,42%)	1 (14,28%)	7
7	Sumber dana lain yang diterima pemerintah kenagarian indrapura tengah	0 (%)	4 (57,15%)	3 (42,86%)	7
8	dana swadaya yang diterima oleh pemerintah kenagarian indrapura tengah	0 (%)	3 (42,86%)	4 (57,15%)	7
9	mekanisme penerimaan dana swadaya	0 (%)	3 (42,86%)	4 (57,15%)	7
10	menggunakan dana Desa didalam pelaksanaan kebijakan pembangunan	3 (42,86%)	4 (57,15%)	0 (%)	7
11	sistem pengelolaan keuangan	1 (14,28%)	6 (85,71%)	0 (%)	7
12	fasilitas sarana dan peralatan pendukung	0 (%)	2 (28,57%)	5 (71,42%)	7
13	sarana dan prasarana kusus untuk pejabat struktural	0 (%)	1 (14,28%)	6 (85,71%)	7
14	fasilitas pendukung dalam pembuatan kebijakan di kenagarian indrapura tengah	0 (%)	4 (57,15%)	3 (42,86%)	7
15	tingkat pengetahuan pegawai terhadap perkembangan teknologi	0 (%)	4 (57,15%)	3 (42,86%)	7
16	penggunaan website oleh pemerintah kenagarian indrapura tengah	0 (%)	2 (28,57%)	5 (71,42%)	7
Jumlah		11	55	34	100
Rata-rata		2	3	2	7
Persentase		28,57%	42,85%	28,58%	100%

Sumber : Data Olahan 2016

Dari data dan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah kenagarian indrapura tengah didalam Merumuskan Rencana Kerja

Pembangunan (RKP) dalam Indikator *Input* sudah cukup baik, ini dibuktikan dengan hasil Kuisisioner dan Observasi penulis terhadap tingkat pendidikan para

pegawai dan Bahan-bahan dasar pendukung pelaksanaan kebijakan yang ada dikantor pemerintah kenagarian Indrapura Tengah. Dari hasil Observasi penulis, tingkat pendidikan secara keseluruhan pegawai yang ada dikantor pemerintah kenagarian indrapura tengah sudah cukup baik ini dibuktikan dengan jumlah presentase dari tingkat pendidikan para pegawai. Penempatan pegawai dalam struktur pemerintah kenagarian

Indrapura tengah penulis melihat Implementasi dari konsep *the righ man and the righ please* belum terlaksana dengan baik. menurut penulis tingkat pengetahuan pegawai sangat berpengaruh terhadap perumusan kebijakan karena, dalam merumuskan sebuah kebijakan tentu memerlukan sebuah wawasan sehingga kebijakan yang akan dirumuskan sesuai dengan tingkat kebutuhan nagari.

Tabel 4 : Distribusi Tanggapan Responden BAMUS Nagari Mengenai Indikator Input (masukan) terhadap evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Kenagarian InderaPura Tengah Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatra Barat

No	Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	sumber daya manusia atau pegawai yang ada dikantor pemerintah kenagarian indrapura tengah	3 (60%)	2 (40%)	0 (%)	5
2	tingkat pendidikan para pegawai yang ada dikantor pemerintah kenagarian indrapura tengah	2 (40%)	3 (60%)	0 (%)	5
3	penempatan pegawai didalam struktur organisasi	1 (20%)	4 (80%)	0 (%)	5
4	pengaruh tingkat pendidikan pegawai terhadap perumusan Rencana Kerja Pembangunan	3 (60%)	2 (40%)	0 (%)	5
5	mekanisme didalam pemilihan anggota Tim Perumus RKP	0 (%)	5 (100%)	0 (%)	5
6	Sumber pendanaan dalam melaksanakan Rencana Kerja pembangunan (RKP)	1 (20%)	4 (80%)	0 (%)	5
7	sumber dana lain yang diterima oleh pemerintah kenagarian indrapura tengah	0 (%)	3 (60%)	2 (40%)	5
8	dana swadaya yang diterima oleh pemerintah kenagarian indrapura tengah	0 (%)	2 (40%)	3 (60%)	5
9	mekanisme penerimaan dana swadaya	0 (%)	2 (40%)	3 (60%)	5
10	menggunakan dana Desa didalam pelaksanaan kebijakan pembangunan	2 (40%)	3 (60%)	0 (%)	5
11	sistem pengelolaan keuangan	1 (20%)	4 (80%)	0 (%)	5
12	fasilitas sarana dan peralatan pendukung	0 (%)	1 (20%)	4 (80%)	5
13	sarana dan prasarana kusus untuk pejabat struktural	0 (%)	1 (20%)	4 (80%)	5
14	fasilitas pendukung dalam pembuatan kebijakan di kenagarian indrapura tengah	0 (%)	3 (60%)	2 (40%)	5
15	tingkat pengetahuan pegawai terhadap perkembangan teknologi	0 (%)	2 (40%)	3 (60%)	5

16	penggunaan website oleh pemerintah kenagarian indrapura tengah	0 (%)	1 (20%)	4 (80%)	5
Jumlah		13	42	25	80
Rata-rata		1	3	1	5
Persentase		20%	60%	20%	100%

Sumber : Data Olahan 2016

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa pendapat dari 5 responden BAMUS Nagari terhadap dua item yang dinilai yaitu Sumber daya pendukung (SDM, uang, sarana/prasarana), dan Bahan-bahan dasar pendukung (peralatan, teknologi), jumlah nilai keseluruhan dari masing-masing kategori penilaian yang terdiri dari : Baik dengan jumlah persentase 20%, cukup Baik dengan jumlah persentase 60%, dan kurang Baik dengan jumlah persentase 20%.

Dari data dan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah kenagarian indrapura tengah didalam Merumuskan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) dalam Indikator *Input* sudah cukup baik, ini dibuktikan dengan hasil Kuisisioner dan Observasi penulis terhadap tingkat pendidikan para

pegawai dan Anggota BAMUS Nagari serta Bahan-bahan dasar pendukung pelaksanaan kebijakan yang ada dikantor pemerintah kenagarian Indrapura Tengah.

Dari hasil Observasi penulis, tingkat pendidikan secara keseluruhan baik itu pegawai yang ada dikantor pemerintah kenagarian indrapura tengah sudah cukup baik ini dibuktikan dengan jumlah presentase dari tingkat pendidikan para pegawai. Namun melihat presentase dari tingkat pendidikan anggota BAMUS Nagari sangat belum baik. Menurut penulis anggota BAMUS Nagari juga seharusnya memprioritas tingkat pendidikan ini penting dikarenakan peran dari BAMUS Nagari didalam merumuskan Rencana Kerja Pembangunan Nagari cukup Besar.

Tabel 5 : Distribusi Tanggapan Responden Masyarakat Mengenai Indikator Input (masukan) terhadap Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Kenagarian InderaPura Tengah Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat

No	Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	sumber daya manusia atau pegawai yang ada dikantor pemerintah kenagarian indrapura tengah	6 (60%)	3 (30%)	1 (10%)	10
2	tingkat pendidikan para pegawai yang ada dikantor pemerintah kenagarian indrapura tengah	2 (20%)	6 (60%)	2 (20%)	10
3	penempatan pegawai didalam struktur organisasi	2 (20%)	6 (60%)	2 (20%)	10
4	pengaruh terhadap perumusan Rencana Kerja Pembangunan	5 (50%)	5 (50%)	0 (%)	10
5	mekanisme didalam pemilihan anggota Tim Perumus RKP	2 (20%)	7 (70%)	1 (10%)	10
6	Sumber pendanaan dalam melaksanakan Rencana Kerja pembangunan (RKP)	1 (10%)	7 (70%)	2 (20%)	10

7	sumber dana lain yang diterima oleh pemerintah kenagarian indrapura tengah	1 (10%)	5 (50%)	4 (40%)	10
8	dana swadaya yang diterima oleh pemerintah kenagarian indrapura tengah	1 (10%)	4 (40%)	5 (50%)	10
9	mekanisme penerimaan dana swadaya	1 (10%)	5 (50%)	4 (40%)	10
10	menggunakan dana Desa didalam pelaksanaan kebijakan pembangunan	3 (30%)	6 (60%)	1 (10%)	10
11	sistem pengelolaan keuangan	2 (20%)	7 (70%)	1 (10%)	10
12	fasilitas sarana dan peralatan pendukung	0 (%)	5 (50%)	5 (50%)	10
13	sarana dan prasarana kusus untuk pejabat struktural	0 (%)	1 (10%)	9 (90%)	10
14	fasilitas pendukung dalam pembuatan kebijakan di kenagarian indrapura tengah	0 (%)	7 (70%)	3 (30%)	10
15	tingkat pengetahuan pegawai terhadap perkembangan teknologi	0 (%)	6 (60%)	4 (40%)	10
16	penggunaan website oleh pemerintah kenagarian indrapura tengah	2 (20%)	2 (20%)	6 (60%)	10
Jumlah		28	82	50	160
Rata-rata		2	5	3	10
Persentase		20%	50%	30%	100%

Sumber : Data Olahan 2016

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa pendapat dari 10 responden Masyarakat terhadap dua item yang dinilai yaitu Sumber daya pendukung (SDM, uang, sarana/prasarana), dan Bahan-bahan dasar pendukung (peralatan, tekhnologi), jumlah nilai keseluruhan dari masing-masing kategori penilaian yang terdiri dari : Baik dengan jumlah persentase 20%, cukup Baik dengan jumlah persentase 50%, dan kurang Baik dengan jumlah persentase 30%. Dari data dan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah kenagarian indrapura tengah didalam Merumuskan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) dalam Indikator *Input* sudah cukup baik, ini dibuktikan dengan hasil Kuisioner dan Observasi penulis terhadap tingkat pendidikan para pegawai dan Anggota BAMUS Nagari serta Bahan-bahan dasar pendukung pelaksanaan kebijakan yang ada dikantor pemerintah kenagarian Indrapura

Tengah. Dari observasi dan data kuisioner, penulis melihat tanggapan masyarakat terhadap tingkat pendidikan para pegawai cukup beragam. Namun bisa disimpulkan bahwa masyarakat sangat berharap wawasan dan gagasan para pegawai menjadi prioritas utama sehingga setiap kebijakan yang dibuat betul-betul tepat sasaran.

2. Proses

Proses yaitu bagaimana sebuah kebijakan diwujudkan dalam bentuk pelayanan langsung kepada masyarakat oleh pemerintah kenagarian melalui perencanaan sebuah kebijakan. Tentu didalam mewujudkan keberhasilan sebuah kebijakan memerlukan sebuah pengumpulan data dan analisis terhadap tingkat keberhasilan suatu program.

Pengumpulan dan analisis biasanya ditujukan pada pengukuran hasil dan tingkat pencapaian dengan mengacu pada

tujuan dan standar tertentu yang telah dipahami. Hasil penilaian melalui proses ini dijadikan dasar formal untuk membuat keputusan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa maksud dari proses adalah

menguraikan strategi mengenai cara mendapatkan dan menganalisis data yang akan membantu meningkatkan efektivitas dari suatu evaluasi program kebijakan Rencana Kerja Pembangunan (RKP)

Tabel 6 : Distribusi Tanggapan Responden Pegawai Mengenai Indikator Proses terhadap Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Kenagarian Inderapura Tengah Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat

No	Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Rencana Kerja Pembangunan (RKP) yang dirumuskan sesuai dengan tingkat kebutuhan masyarakat	4 (57,14%)	3 (42,86%)	0 (%)	7
2	fungsi dari pembangunan yang sudah dibuat oleh pemerintah kenagarian indrapura tengah	3 (42,86%)	4 (57,14%)	0 (%)	7
3	melaksanakan Pengkajian terhadap tingkat keberhasilan pembangunan	2 (28,57%)	4 (57,14%)	1 (14,28)	7
4	melaksanakan Pendataan terhadap Perencanaan pembangunan	3 (42,86%)	4 (57,14%)	0 (%)	7
5	sistem pengelolaan terhadap infrastruktur publik	1 (14,28%)	6 (85,71%)	0 (%)	7
6	Rumusan Kebijakan Pembangunan yang memprioritas kebutuhan masyarakat	3 (42,86%)	4 (57,14%)	0 (%)	7
7	Kebijakan Pembangunan yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat	2 (28,57%)	4 (57,14%)	1 (14,28%)	7
8	perumusan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) mengedepankan efesiensi anggaran	2 (28,57%)	5 (71,42%)	0 (%)	7
9	kebijakan strategis yang tertuang dalam Rencana Kerja Pembangunan (RKP)	4 (57,14%)	3 (42,85%)	0 (%)	7
10	mengedepankan konsep Musyawarah dan Mufakat dalam perumusan Rencana Kerja Pembangunan (RKP)	1 (14,28%)	6 (85,71%)	0 (%)	7
11	peran masyarakat didalam perumusan Rencana Kerja Pembangunan sudah terlaksana (RKP)	2 (28,57%)	5 (71,42%)	0 (%)	7
12	Pelaksanaan MUSRENBANG dalam penetapan Rencana kerja Pembangunan (RKP)	2 (28,57%)	5 (71,42%)	0 (%)	7
Jumlah		29	53	2	84
Rata-rata		2	4	1	7
Persentase		28,57%	57,14%	14,28%	100%

Sumber : Data Olahan 2016

Dari data dan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah kenagarian indrapura tengah didalam Merumuskan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) dalam Indikator

Proses sudah cukup baik, ini dibuktikan dengan hasil Kuisisioner dan Observasi penulis terhadap kebijakan pembangunan pemerintah kenagarian indrapura tengah baik yang sudah terlaksana maupun

belum terlaksana Dari Observasi dan data Kuisisioner, penulis melihat kebijakan-kebijakana pembangunan sudah sesuai dengan tingkat kebutuhan dasar masarakat Kenagarian Indrapura Tengah seperti pembangunan infrastruktur jalan, namun dilihat dari keseluruhan visi & Misi Kenagarian Indrapura Tengah, kebijakan-kebijakan yang tertuang dalam Rencana Kerja

Pembangunan (RKP) kenagarian Indrapura Tengah masih terfocus pada pembangunan Infrastruktur semata. Dari hasil Observasi juga terlihat pemerintah kenagarian indrapura tengah masih minim merumuskan kebijakan terhadap pemberdayaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sumber Daya alam (SDA) Nagari.

Tabel 7 : Distribusi Tanggapan Responden BAMUS Nagari Mengenai Indikator Proses terhadap Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Kenagarian InderaPura Tengah Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan provinsi Sumatra Barat

No	Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Rencana Kerja Pembangunan (RKP) yang dirumuskan sesuai dengan tingkat kebutuhan masyarakat	3 (60%)	2 (40%)	0 (%)	5
2	fungsi dari pembangunan yang sudah dibuat oleh pemerintah kenagarian indrapura tengah	3 (60%)	2 (40%)	0 (%)	5
3	melaksanakan Pengkajian terhadap tingkat keberhasilan pembangunan	2 (40%)	3 (60%)	0 (%)	5
4	melaksanakan Pendataan terhadap Perencanaan pembangunan	2 (40%)	2 (40%)	1 (20%)	5
5	sistem pengelolaan terhadap infrastruktur publik	1 (20%)	4 (80%)	0 (%)	5
6	Rumusan Kebijakan Pembangunan yang memprioritas kebutuhan masyarakat	3 (60%)	2 (40%)	0 (%)	5
7	Kebijakan Pembangunan yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat	2 (40%)	2 (40%)	1 (20%)	5
8	perumusan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) mengedepankan efesiensi anggaran	2 (40%)	3 (60%)	0 (%)	5
9	kebijakan strategis yang tertuang dalam Rencana Kerja Pembangunan (RKP)	4 (80%)	1 (20%)	0 (%)	5
10	mengedepankan konsep Musyawarah dan Mufakat dalam perumusan Rencana Kerja Pembangunan (RKP)	1 (20%)	4 (80%)	0 (%)	5
11	peran masyarakat didalam perumusan Rencana Kerja Pembangunan sudah terlaksana (RKP)	2 (40%)	3 (60%)	0 (%)	5
12	Pelaksanaan MUSRENBANG dalam penetapan Rencana kerja Pembangunan (RKP)	1 (20%)	4 (80%)	0 (%)	5
Jumlah		26	32	2	60
Rata-rata		2	2	1	5
Persentase		40%	40%	20%	100%

Sumber : Data Olahan 2016

Dari data dan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah kenagarian indrapura tengah didalam Merumuskan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) dalam Indikator *Proses* sudah cukup baik, ini dibuktikan dengan hasil Kuisisioner dan Observasi penulis terhadap kebijakan pembangunan pemerintah kenagarian indrapura tengah baik yang sudah terlaksana maupun belum terlaksana

Dari Observasi dan data Kuisisioner terhadap BAMUS dapat disimpulkan bahwa kebijakan-kebijakana pembangunan sudah sesuai dengan tingkat kebutuhan dasar masarakat

Kenagarian Indrapura Tengah, seperti pembangunan infrastruktur jalan. Dari hasil wawancara penulis bersama Anggota BAMUS juga menjelaskan bahwa setiap membuat kebijakan pemerintahan Nagari selalu Melakukan MUSRENBANG Nagari untuk menyerap aspirasi masyarakat. Namun kebijakan-kebijakan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pembangunan (RKP) kenagarian Indrapura Tengah masih terfocus pada pembangunan Infrastruktur semata. Dengan demikian sangat jelas terlihat pemerintah kenagarian indrapura tengah masih minim merumuskan kebijakan terhadap pemberdayaan dan pengembangan Nagari.

Tabel 8 : Distribusi Tanggapan Responden Masyarakat Mengenai Indikator Proses terhadap Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Kenagarian InderaPura Tengah Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan provinsi Sumatra Barat

No	Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Rencana Kerja Pembangunan (RKP) yang dirumuskan sesuai dengan tingkat kebutuhan masyarakat	4 (40%)	5 (50%)	1 (10%)	10
2	fungsi dari pembangunan yang sudah dibuat oleh pemerintah kenagarian indrapura tengah	3 (30%)	5 (50%)	2 (20%)	10
3	melaksanakan Pengkajian terhadap tingkat keberhasilan pembangunan	2 (20%)	6 (60%)	2 (20%)	10
4	melaksanakan Pendataan terhadap Perencanaan pembangunan	3 (30%)	6 (60%)	1 (10%)	10
5	sistem pengelolaan terhadap infrastruktur publik	1 (10%)	7 (70%)	2 (20%)	10
6	Rumusan Kebijakan Pembangunan yang memprioritas kebutuhan masyarakat	3 (30%)	7 (70%)	0 (%)	10
7	Kebijakan Pembangunan yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat	2 (20%)	6 (60%)	2 (20%)	10
8	perumusan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) mengedepankan efesiensi anggaran	2 (20%)	8 (80%)	0 (%)	10
9	kebijakan strategis yang tertuang dalam Rencana Kerja Pembangunan (RKP)	4 (40%)	6 (60%)	0 (%)	10
10	mengedepankan konsep Musyawarah dan Mufakat dalam perumusan Rencana Kerja Pembangunan (RKP)	1 (10%)	9 (90%)	0 (%)	10
11	peran masyarakat didalam perumusan Rencana Kerja Pembangunan sudah terlaksana (RKP)	2 (20%)	7 (70%)	1 (10%)	10

12	Pelaksanaan MUSRENBANG dalam penetapan Rencana kerja Pembangunan (RKP)	2 (20%)	7 70%)	1 (10%)	10
Jumlah		29	79	12	14
Rata-rata		2	7	1	10
Persentase		20%	70%	10%	100%

Sumber : Data Olahan Penulis 2016

Dari data dan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah kenagarian indrapura tengah didalam Merumuskan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) dalam Indikator Proses sudah cukup baik, ini dibuktikan dengan hasil Kuisisioner dan Observasi penulis terhadap kebijakan pembangunan pemerintah kenagarian indrapura tengah baik yang sudah terlaksana maupun belum terlaksana

Dari Observasi dan data Kuisisioner terhadap Masyarakat dapat disimpulkan bahwa kebijakan-kebijakana pemerintah kenagarian indrapura tengah dalam aspek pembangunan sudah sesuai dengan tingkat kebutuhan dasar masarakat Kenagarian Indrapura Tengah, seperti pembangunan infrastruktur jalan. xDari data dan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Harus ada sinkronisasi antara tujuan organisasi dengan tujuan-tujuan individu didalam organisasi dikategorikan cukup Baik dengan persentase 70% dari keseluruhan tanggapan atau jawaban responden yang berjumlah 10 orang.

3. Output (Hasil)

Outputs (hasil) Yaitu hasil dari pelaksanaan kebijakan, didalam perencanaan sebuah kebijakan tentu pengkajian tingkat keberhasilan dari program-program yang dirumuskan didalam perumusan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) harus dikaji dengan seksama sehingga tingkat capaian sebuah program akan sangat efektif sesuai apa yang sudah direncanakan.

Apapun bentuk dan pendekatan yang dilakukan didalam melakukan evaluasi, penentuan tujuan evaluasi akan selalu berkenaan dengan apa yang diharapkan dari pelaksanaan suatu evaluasi, yaitu output (hasil)

Sehubungan dengan evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Kenagarian InderaPura Tengah Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan provinsi Sumatra Barat, Selanjutnya untuk mengetahui jawaban atau tanggapan dari responden Pegawai yang berjumlah 7 orang responden terhadap indikator Outputs (hasil) yang terdiri dari empat item yang dinilai yaitu Tepat tidaknya sasaran yang dituju , Berapa besar sasaran yang tercakup, Seberapa banyak kelompok sasaran yang tertangani dan Seberapa besar kelompok yang terlibat

Tabel 9 : Distribusi Tanggapan Responden Pegawai Mengenai Indikator Output (hasil) terhadap Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Kenagarian InderaPura Tengah Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan provinsi Sumatra Barat

No	Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	sasaran kebijakan pembangunan nagari	4 (57,14%)	3 (42,85%)	0 (%)	7

2	Rencana Kerja Pembangunan sesuai dengan visi dan misi kenagarian indrapura tengah	2 (28,57%)	4 (57,14%)	1 (14,28%)	7
3	pembangunan yang sudah Terlaksana sesuai dengan Rencana Kerja Pembangunan	4 (57,14%)	3 (42,85%)	0 (%)	7
4	kelompok sasaran kebijakan yang belum tertangani	2 (28,57%)	4 (57,14%)	1 (14,28%)	7
5	pengembangan dan pengelolaan Sumber Daya Alam Nagari	1 (14,28%)	5 (71,42%)	1 (14,28%)	7
6	pemberdayaan baik dibidang ekonomi kreatif maupun dibidang kebudayaan Nagari	2 (28,57%)	5 (71,42%)	0 (%)	7
7	pembinaan baik dibidang pendidikan maupun dibidang sosial budaya	3 (42,85%)	3 (42,85%)	1 (14,28%)	7
8	pembentukan Badan usaha Milik Nagari (BUM Nagari)	1 (14,28%)	5 (71,42%)	1 (14,28%)	7
9	kelompok sasaran yang ditangani dalam Rencana Kerja Pembangunan (RKP)	4 (57,14%)	3 (42,85%)	0 (%)	7
10	pembinaan baik dibidang pendidikan	3 (42,85%)	4 (57,14%)	0 (%)	7
11	pembinaan baik dibidang sosial budaya	1 (14,28%)	4 (57,14%)	2 (28,57%)	7
12	pemberdayaan baik dibidang ekonomi kreatif maupun dibidang kebudayaan Nagari	0 (%)	5 (71,42%)	2 (28,57%)	7
13	kelompok sasaran yang terlibat dalam pembangunan	1 (14,28%)	6 (85,71%)	0 (%)	7
14	koordinasi yang dilakukan oleh pemerintah kenagarian indrapura tengah	0 (%)	5 (71,42%)	2 (28,57%)	7
15	Sosialisasi Terhadap Masyarakat dalam perumusan Rencana Kerja Pembangunan (RKP)	1 (14,28%)	5 (71,42%)	1 (14,28%)	7
16	Kerja Sama Terhadap pihak Swadaya didalam Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan (RKP)	1 (14,28%)	6 (85,71%)	0 (%)	7
Jumlah		30	70	12	112
Rata-rata		2	4	1	7
Persentase		28,57%	57,14%	14,28%	100%

Sumber : Data Olahan 2016

Dari data dan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah kenagarian indrapura tengah didalam Merumuskan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) dalam Indikator *Outputs* (hasil) sudah cukup baik, ini dibuktikan dengan hasil Kuisisioner dan Observasi penulis terhadap kelompok kebijakan pembangunan pemerintah kenagarian indrapura tengah baik yang sudah terlaksana maupun belum terlaksana.

Dari Observasi dan data Kuisisioner, penulis melihat kebijakan-kebijakana pembangunan sudah sesuai dengan tingkat kebutuhan dasar masarakat Kenagarian Indrapura Tengah seperti pembangunan infrastruktur jalan, namun dilihat dari tujuan Nagari Kenagarian Indrapura Tengah, kebijakan-kebijakan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pembangunan (RKP) kenagarian Indrapura Tengah masih terfocus pada pembangunan Infrastruktur Publik. Dari hasil Observasi juga terlihat pemerintah

kenagarian indrapura tengah masih belum maksimal dalam mengelompokkan kebijakan-kebijakan terhadap pemberdayaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sumber Daya alam (SDA) Nagari. Dalam perumusan Rencana Kerja Pembangunan

(RKP) Nagari sangat dibutuhkan masukan-masukan dari beberapa kelompok masyarakat sehingga sasaran dari kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah kenagarian indrapura tengah tepat guna dan tepat dalam pemanfaatannya.

Tabel 10 : Distribusi Tanggapan Responden BAMUS Nagari Mengenai Indikator Output (hasil) terhadap Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Kenagarian InderaPura Tengah Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatra Barat

No	Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	sasaran kebijakan pembangunan sudah sesuai dengan tingkat kebutuhan nagari	3 (60%)	2 (40%)	0 (%)	5
2	Rencana Kerja Pembangunan sesuai dengan visi dan misi kenagarian indrapura tengah	1 (20%)	4 (80%)	0 (%)	5
3	pembangunan yang sudah Terlaksana sesuai dengan Rencana Kerja Pembangunan	3 (60%)	2 (40%)	0 (%)	5
4	kelompok sasaran kebijakan yang belum tertangani	1 (20%)	4 (80%)	0 (%)	5
5	pengembangan dan pengelolaan Sumber Daya Alam Nagari	1 (20%)	3 (60%)	1 (20%)	5
6	pemberdayaan baik dibidang ekonomi kreatif maupun dibidang kebudayaan Nagari	1 (20%)	4 (80%)	0 (%)	5
7	pembinaan baik dibidang pendidikan maupun dibidang sosial budaya	3 (60%)	2 (40%)	0 (%)	5
8	Rencana Kerja Pembangunan tentang pembentukan Badan usaha Milik Nagari (BUM Nagari)	1 (20%)	4 (80%)	0 (%)	5
9	kelompok sasaran yang ditangani dalam Rencana Kerja Pembangunan (RKP)	4 (80%)	1 (20%)	0 (%)	5
10	pembinaan baik dibidang pendidikan	3 (60%)	2 (40%)	0 (%)	5
11	pembinaan baik dibidang sosial budaya	0 (%)	4 (80%)	1 (20%)	5
12	rumusan tentang pemberdayaan baik dibidang ekonomi kreatif maupun dibidang kebudayaan Nagari	0 (%)	4 (80%)	1 (20%)	5
13	kelompok sasaran yang terlibat dalam pembangunan	1 (20%)	4 (80%)	0 (%)	5
14	koordinasi yang dilakukan oleh pemerintah kenagarian indrapura tengah dalam perumusan Rencana Kerja Pembangunan (RKP)	0 (%)	5 (100%)	0 (%)	5
15	Sosialisasi Terhadap Masyarakat dalam perumusan Rencana Kerja Pembangunan (RKP)	1 (20%)	3 (60%)	1 (20%)	5

16	Kerja Sama Terhadap pihak Swadaya didalam Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan (RKP)	1 (20%)	4 (80%)	0 (%)	5
Jumlah		24	52	4	80
Rata-rata		1	3	1	5
Persentase		20%	60%	20%	100%

Sumber : Data Olahan 2016

Dari data dan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah kenagarian indrapura tengah didalam Merumuskan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) dalam Indikator *Outputs* (hasil) sudah cukup baik, ini dibuktikan dengan hasil Kuisisioner dan Observasi penulis terhadap analisis jenis kelompok kebijakan pembangunan yang sudah terlaksana maupun belum terlaksana.

Dari Observasi dan data Kuisisioner, penulis melihat kebijakan-kebijakana pembangunan sudah sesuai dengan tingkat kebutuhan dasar masarakat Kenagarian Indrapura Tengah seperti pembangunan infrastruktur jalan, namun dilihat dari tujuan Nagari Kenagarian Indrapura Tengah, kebijakan-kebijakan

yang tertuang dalam Rencana Kerja Pembangunan (RKP) kenagarian Indrapura Tengah masih terfocus pada pembangunan Infrastruktur Publik. Dari hasil Observasi juga terlihat pemerintah kenagarian indrapura tengah masih belum maksimal dalam mengelompokkan kebijakan-kebijakan terhadap pemberdayaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sumber Daya alam (SDA) Nagari. Dalam perumusan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Nagari sangat dibutuhkan masukan-masukan dari beberapa kelompok masyarakat sehingga sasaran dari kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah kenagarian indrapura tengah tepat guna dan tepat dalam pemanfaatannya.

Tabel 11 : Distribusi Tanggapan Responden Masyarakat Mengenai Indikator Output (hasil) terhadap Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Kenagarian InderaPura Tengah Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatra Barat

No	Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	sasaran kebijakan pembangunan sudah sesuai dengan tingkat kebutuhan nagari	4 (40%)	4 (40%)	2 (20%)	10
2	Rencana Kerja Pembangunan sesuai dengan visi dan misi kenagarian indrapura tengah	2 (20%)	7 (70%)	1 (10%)	10
3	pembangunan yang sudah Terlaksana sesuai dengan Rencana Kerja Pembangunan	4 (40%)	4 (40%)	2 (20%)	10
4	kelompok sasaran kebijakan yang belum tertangani	2 (20%)	5 (50%)	3 (30%)	10
5	pengembangan dan pengelolaan Sumber Daya Alam Nagari	2 (20%)	6 (60%)	2 (20%)	10
6	pemberdayaan baik dibidang ekonomi kreatif maupun dibidang kebudayaan Nagari	2 (20%)	7 (70%)	1 (10%)	10

7	Rencana Kerja Pembangunan tentang pembinaan baik dibidang pendidikan maupun dibidang sosial budaya	3 (30%)	5 (50%)	2 (20%)	10
8	Rencana Kerja Pembangunan tentang pembentukan Badan usaha Milik Nagari (BUM Nagari)	2 (20%)	6 (60%)	2 (20%)	10
9	kelompok sasaran yang ditangani dalam Rencana Kerja Pembangunan (RKP)	4 (40%)	6 (60%)	0 (%)	10
10	pembinaan baik dibidang pendidikan	3 (30%)	6 (60%)	1 (10%)	10
11	pembinaan baik dibidang sosial budaya	1 (10%)	5 (50%)	4 (40%)	10
12	rumusan tentang pemberdayaan baik dibidang ekonomi kreatif maupun dibidang kebudayaan Nagari	0 (%)	6 (60%)	4 (40%)	10
13	kelompok sasaran yang terlibat dalam pembangunan	1 (10%)	8 (80%)	1 (10%)	10
14	koordinasi yang dilakukan oleh pemerintah kenagarian indrapura tengah dalam perumusan Rencana Kerja Pembangunan (RKP)	0 (%)	7 (70%)	3 (30%)	10
15	Sosialisasi Terhadap Masyarakat dalam perumusan Rencana Kerja Pembangunan (RKP)	1 (%)	6 (60%)	3 (30%)	10
16	Kerja Sama Terhadap pihak Swadaya didalam Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan (RKP)	1 (10%)	6 (60%)	3 (30%)	10
Jumlah		32	94	34	160
Rata-rata		2	6	2	10
Persentase		20%	60%	20%	100%

Sumber : Data Olahan 2016

Dari data dan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah kenagarian indrapura tengah didalam Merumuskan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) dalam Indikator *Outputs* (hasil) sudah cukup baik, ini dibuktikan dengan hasil Kuisisioner dan Observasi penulis terhadap analisis jenis kelompok kebijakan pembangunan yang sudah terlaksana maupun belum terlaksana.

Dari Observasi dan data Kuisisioner, penulis melihat kebijakan-kebijakana pembangunan sudah sesuai dengan tingkat kebutuhan masarakat Kenagarian Indrapura Tengah seperti pembangunan infrastruktur jalan, Dari hasil Observasi juga terlihat pemerintah kenagarian indrapura tengah masih belum maksimal

dalam mengelompokkan kebijakan-kebijakan terhadap pemberdayaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sumber Daya alam (SDA) Nagari. Dalam perumusan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Nagari sangat dibutuhkan masukan-masukan dari beberapa kelompok masyarakat sehingga sasaran dari kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah kenagarian indrapura tengah tepat guna dan tepat dalam pemanfaatannya

4. Outcome (Dampak)

Outcome (dampak) Yaitu apakah suatu pelaksanaan kebijakan berdampak nyata terhadap kelompok sasaran sesuai dengan tujuan kebijakan. Indikator ini menunjukkan pengaruh, baik itu positif maupun negatif, yang ditimbulkan akibat

pelaksanaan kebijakan atau program atau kegiatan dan asumsi yang telah digunakan

Tabel 12 : Distribusi Tanggapan Responden pegawai Mengenai Indikator outcome (dampak) terhadap Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Kenagarian Inderapura Tengah Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan provinsi Sumatera Barat.

No	Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	kendala didalam Perumusan Rencana Kerja Pembangunan (RKP)	2 (28,57%)	5 (71,42%)	0 (%)	7
2	perubahan yang dilakukan pemerintah kenagarian indrapura tengah didalam menetapkan perumusan Rencana Kerja Pembangunan (RKP)	2 (28,57%)	5 (71,42%)	0 (%)	7
3	perubahan kebijakan dalam menetapkan perumusan Rencana Kerja Pembangunan (RKP)	1 (14,28%)	5 (71,42%)	1 (14,28%)	7
4	perubahan target Capain dalam pelaksanaan Pembangunan	2 (28,57%)	4 (57,14%)	1 (14,28%)	7
5	Kelompok Sasaran yang dilibatkan dalam Perumusan Rencana Kerja Pembangunan	1 (14,28%)	5 (71,42%)	1 (14,28%)	7
6	pembangunan yang dirobah dalam proses pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan	1 (14,28%)	5 (71,42%)	1 (14,28%)	7
7	Kelompok Sasaran yang dirombah sesuai dengan tingkat Pemanfaatannya	1 (14,28%)	6 (85,71%)	0 (%)	7
8	Kelompok Sasaran yang dihapus dikarenakan tidak sesuai dengan Kebutuhan masyarakat	3 (42,85%)	4 (57,14%)	0 (%)	7
9	perubahan yang terjadi pada kelompok sasaran	1 (14,28%)	6 (85,71%)	0 (%)	7
10	Kelompok Sasaran yang dirobah oleh pemerintahan kenagarian indrapura tengah	1 (14,28%)	5 (71,42%)	1 (14,28%)	7
11	Kelompok Sasaran yang mengalami dampak atau perubahan dalam pencapaiannya	3 (42,85%)	4 (57,14%)	0 (%)	7
12	tujuan dari Rencana Kerja Pembangunan (RKP)	2 (28,57%)	4 (57,14%)	1 (14,28%)	7
Jumlah		20	58	6	84
Rata-rata		1	5	1	7
Persentase		14,28%	71,42%	14,28%	100%

Sumber : Data Olahan 2016

Dari data dan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah kenagarian indrapura tengah didalam Merumuskan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) dalam Indikator

Outcome (Dampak) sudah cukup baik, ini dibuktikan dengan hasil Kuisisioner dan Observasi penulis terhadap analisis jenis keberhasilan kelompok kebijakan

pembangunan yang sudah terlaksana maupun belum terlaksana.

Dari Observasi dan data Kuisioner, penulis melihat kebijakan-kebijakan pembangunan sudah sesuai dengan tingkat kebutuhan masarakat Kenagarian Indrapura Tengah seperti pembangunan infrastruktur jalan, Dari hasil Observasi juga terlihat pemerintah kenagarian indrapura tengah masih belum maksimal dalam mengelompokkan kebijakan-kebijakan. Dalam perumusan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Nagari sangat

dibutuhkan masukan-masukan dari beberapa kelompok masyarakat sehingga sasaran dari kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah kenagarian indrapura tengah tepat guna dan tepat dalam pemanfaatannya. Dari data dan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Harus ada sinkronisasi antara tujuan organisasi dengan tujuan-tujuan individu didalam organisasi dikategorikan cukup Baik dengan persentase 71,42% dari keseluruhan tanggapan atau jawaban responden yang berjumlah 7 orang.

Tabel 13 : Distribusi Tanggapan Responden BAMUS Nagari Mengenai Indikator Outcome (dampak) terhadap Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Kenagarian InderaPura Tengah Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatra Barat

No	Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	kendala didalam Perumusan Rencana Kerja Pembangunan	2 (40%)	3 (60%)	0 (%)	5
2	perubahan yang dilakukan didalam menetapkan perumusan Rencana Kerja Pembangunan	2 (40%)	3 (60%)	0 (%)	5
3	perubahan kebijakan dalam menetapkan perumusan Rencana Kerja Pembangunan	0 (%)	4 (80%)	1 (20%)	5
4	perubahan target Capain dalam pelaksanan Pembangunan	2 (40%)	3 (60%)	0 (%)	5
5	Kelompok Sasaran yang dilibatkan dalam Perumusan Rencana Kerja Pembangunan	0 (%)	4 (80%)	1 (20%)	5
6	Kelompok Sasaran pembangunan yang dirobah dalam Rencana Kerja Pembangunan	1 (20%)	3 (60%)	1 (20%)	5
7	Kelompok Sasaran yang dirobah sesuai dengan tingkat Pemanfaatannya	1 (20%)	4 (80%)	0 (%)	5
8	Kelompok Sasaran yang dihapus dikarenakan tidak sesuai dengan Kebutuhan masyarakat	2 (40%)	2 (40%)	1 (20%)	5
9	perubahan yang terjadi pada kelompok sasaran dalam Perumusan Rencana Kerja Pembangunan (RKP)	1 (20%)	4 (80%)	0 (%)	5
10	Kelompok Sasaran yang dirobah oleh pemerintahan kenagarian indrapura tengah	1 (20%)	3 (60%)	1 (20%)	5
11	Kelompok Sasaran yang mengalami dampak atau perubahan dalam pencapaiannya	2 (40%)	2 (40%)	1 (20%)	5
12	tujuan dari Rencana Kerja Pembangunan (RKP) sudah terlaksana dengan Efektif dan Efesien	2 (40%)	2 (40%)	1 (20%)	5

Jumlah	16	37	7	60
Rata-rata	1	3	1	5
Persentase	20%	60%	20%	100%

Sumber : Data Olahan 2016

Dari Observasi dan data Kuisisioner, penulis melihat kebijakan-kebijakana pembangunan sudah sesuai dengan tingkat kebutuhan masarakat Kenagarian Indrapura Tengah seperti pembangunan infrastruktur jalan, Dari hasil Observasi juga terlihat pemerintah kenagarian indrapura tengah masih belum maksimal dalam mengelompokkan kebijakan-kebijakan. Dalam perumusan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Nagari sangat dibutuhkan masukan-masukan dari beberapa kelompok masyarakat sehingga

sasaran dari kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah kenagarian indrapura tengah tepat guna dan tepat dalam pemanfaatannya.

Dari data dan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Harus ada sinkronisasi antara tujuan organisasi dengan tujuan-tujuan individu didalam organisasi dikategorikan cukup Baik dengan persentase 60% dari keseluruhan tanggapan atau jawaban responden yang berjumlah 5 orang.

Tabel 14 : Distribusi Tanggapan Responden Masyarakat Mengenai Indikator Outcome (dampak) terhadap Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Kenagarian InderaPura Tengah Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat

No	Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	kendala didalam Perumusan Rencana Kerja Pembangunan	2 (20%)	5 (50%)	3 (30%)	10
2	perubahan yang dilakukan didalam menetapkan Rencana Kerja Pembangunan	2 (20%)	5 (50%)	3 (30%)	10
3	perubahan kebijakan dalam Rencana Kerja Pembangunan	1 (10%)	7 (70%)	2 (20%)	10
4	perubahan target Capain dalam pelaksanan Pembangunan	2 (20%)	5 (50%)	3 (30%)	10
5	Kelompok Sasaran yang dilibatkan dalam Perumusan Rencana Kerja Pembangunan	1 (10%)	7 (70%)	2 (20%)	10
6	Kelompok Sasaran pembangunan yang dirobah dalam proses pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan	1 (10%)	5 (50%)	4 (40%)	10
7	Kelompok Sasaran yang dirombah sesuai dengan tingkat Pemanfaatannya bagi masyarakat	1 (10%)	7 (70%)	2 (20%)	10
8	Kelompok Sasaran yang dihapus dikarenakan tidak sesuai dengan Kebutuhan masyarakat	2 (20%)	6 (60%)	2 (20%)	10
9	perubahan yang terjadi pada kelompok sasaran dalam Perumusan Rencana Kerja Pembangunan (RKP)	1 (10%)	8 (80%)	1 (10%)	10
10	Kelompok Sasaran yang dirobah oleh pemerintahan kenagarian indrapura tengah	1 (10%)	6 (60%)	3 (30%)	10

11	Kelompok Sasaran yang mengalami dampak atau perubahan dalam pencapaiannya	3 (30%)	5 (50%)	2 (20%)	10
12	tujuan dari Rencana Kerja Pembangunan (RKP) sudah terlaksana dengan Efektif dan Efisien	2 (20%)	5 (50%)	3 (30%)	10
Jumlah		19	71	30	120
Rata-rata		2	6	2	10
Persentase		20%	60%	20%	100%

Sumber : Data Olahan 2016

Dapat diketahui bahwa pendapat dari 10 responden Masyarakat untuk item yang dinilai ada tiga item yang dinilai yaitu Ada atau tidak perubahan pada target/sasaran, Seberapa besar perubahan kelompok sasaran dan Seberapa signifikan perubahan yang terjadi pada kelompok sasaran dibandingkan dengan tujuan yang ingin dicapai. tanggapan atau jawaban responden kategori penilaian Baik adalah sebanyak 2 orang atau sama dengan 20%. Sedangkan untuk kategori penilaian cukup Baik adalah sebanyak 6 orang atau sama dengan 60%, sedangkan untuk kategori penilaian kurang Baik adalah sebanyak 2 orang atau sama dengan 20%.

Dari hasil Observasi penulis dilapangan, melihat kebijakan-kebijakana pembangunan sudah sesuai dengan tingkat kebutuhan pokok masarakat Kenagarian Indrapura Tengah seperti pembangunan infrastruktur jalan, Dari hasil Observasi juga terlihat pemerintah kenagarian indrapura tengah masih belum maksimal dalam mengelompokkan kebijakan-kebijakan. Dalam pelaksanaannya terlihat pemerintah nagari minim mengikutsertakan masyarakat didalam

proses perumusan kebijakan pembangunan nagari ini terlihat dari tidak adanya masyarakat yang mengikutsertakan proses MUSRENBANG Nagari. Dalam perumusan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Nagari sangat dibutuhkan masukan-masukan dari beberapa kelompok masyarakat sehingga sasaran dari kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah kenagarian indrapura tengah tepat guna dan tepat dalam pemanfaatannya.

Dari data dan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Harus ada sinkronisasi antara tujuan organisasi dengan tujuan-tujuan individu didalam organisasi dikategorikan cukup Baik dengan persentase 60% dari keseluruhan tanggapan atau jawaban responden yang berjumlah 10 orang.

Selanjutnya untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan dari evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Kenagarian InderaPura Tengah Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan provinsi Sumatra Barat dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 15 : Rekapitulasi Tanggapan Responden terhadap Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Kenagarian Inderapura Tengah Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatra Barat

No	Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Input (Masukan)	5 (22,73%)	11 (50%)	6 (27,27%)	22
2	Proses	6 (27,27%)	13 (59,1%)	3 (13,63%)	22
3	Output (hasil)	5 (22,72%)	13 (59,1%)	4 (18,18%)	22
4	Outcome (dampak)	4 (18,18%)	14 (63,64%)	4 (18,18%)	22
Jumlah		20	51	17	88
Rata-rata		5	13	4	22
Persentase		22,72%	59,1%	18,18%	100%

Sumber : Data Olahan 2016

Berdasarkan observasi penulis dilapangan terhadap Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Kenagarian Indrapura Tengah Kecamatan Pancung Soal kabupaten Pesisir Selatan sudah cukup baik. Ini terlihat dari program-program yang tertuang didalam Rencana Kerja Pembangunan sudah terealisasi dengan baik. Seperti : Pembangunan Jalan Usaha Tani, penimbunan jalan, Pembersihan saluran irigasi dan pelebaran saluran irigasi di pasar sebelah Kampung Hulu Kenagarian Indrapura Tengah Kecamatan Pancung Soal. Jika Dilihat dari data perumusan Rencana Kerja Pembangunan Nagari (RKP-NAGARI) Tahun 2014, hasil observasi Penulis terhadap pembangunan infrastruktur publik sudah terealisasi pembangunannya dengan baik. Namun penulis melihat progres pembangunan yang dirumuskan masih memfokuskan pembangunan Infrastruktur publik, sehingga pengembangan dan pemerdayaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sumber Daya Alam (SDA) minim dalam pengkajian pemerintah kenagarian indrapura tengah didalam perumusan Rencana Kerja Pembangunan. Untuk itu diharapkan pemerintah kenagarian indrapura tengah didalam

merumuskan Rencana Kerja Pembangunan Nagari menambahkan focus Perumusan kebijakan pembangunannya dibidang pemberdayaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sumber Daya Alam (SDA) sehingga pencapaian dari tujuan pemerintah terhadap pemerataan pembangunan dari segala aspek dapat tercapai dengan baik.

Dari data dan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa untuk variabel Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Kenagarian Indrapura Tengah Kecamatan Pancung Soal kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatra Barat cukup terlaksana karena berdasarkan pendapat dari responden yang diukur dari 4 (Empat) indikator. Maka diharapkan pemerintah kenagarian mengoptimalakan lagi focus dari program-program yang akan dirumuskan sehingga pembangunan, pengembangan dan pemberdayaan juga menjadi prioritas Pemerintah Nagari dalam pemerataan pembangunan di Kenagarian Indrapura Tengah Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatra Barat.

Hambatan Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Nagari (RKP- Nagari) pemerintah kenagarian indrapura tengah (Studi Evaluasi)

1. Keterbatasan sumber daya aparatur pemerintahan nagari dalam aspek pendidikan dan pelatihan juga menjadi hambatan pemerintah kenagarian indrapura tengah dalam melaksanakan program-program pembangunan. Ini bisa dilihat dari tingkat pendidikan aparatur pemerintah kenagarian indrapura tengah yang tertuang pada tabel V.5.
2. Keterbatasan dana pembangunan termasuk faktor penghambat pemerintah kenagarian Indrapura tengah dalam melaksanakan program-program pembangunan di kenagarian indrapura tengah kecamatan pancung soal.
3. Perbedaan pandangan dan kultur masyarakat juga termasuk faktor penghambat pemerintah kenagarian Indrapura tengah dalam melaksanakan program-program pembangunan di kenagarian indrapura tengah kecamatan pancung soal

Kesimpulan

- 1 Untuk Indikator Input (masukan) kategori penilaian responden pegawai pemerintah nagari berada pada kategori cukup Baik, dan untuk kategori penilaian Responden BAMUS Nagari terhadap Input (masukan) cukup Baik dan untuk kategori penilaian responden Masyarakat terhadap Input (masukan) juga cukup Baik. Tetapi jika dari ketiga responden digabungkan dalam tabel rekapitulasi indikator dari Input (masukan) dimana pada tabel tersebut penilaian dikategorikan cukup Baik. Maka oleh karena itu, untuk tingkat Input (masukan) yang terdiri dari dua item yang dinilai yaitu Sumber daya

pendukung (SDM, uang, sarana/prasarana), Bahan-bahan dasar pendukung (peralatan, teknologi). maka kedepannya harus lebih diperhatikan kembali Rencana Kerja Pembangunan sesuai dengan tujuan organisasi dan individu yang ada didalam organisasi.

- 2 Untuk Indikator Proses kategori penilaian responden pegawai pemerintah nagari berada pada kategori cukup terlaksana, dan untuk kategori penilaian responden BAMUS Nagari terhadap Proses cukup Baik dan untuk kategori penilaian responden Masyarakat terhadap Proses juga cukup Baik. Tetapi jika dari ketiga responden digabungkan dalam tabel rekapitulasi indikator dari Proses dimana pada tabel tersebut penilaian dikategorikan cukup Baik. Maka oleh karena itu, untuk tingkat Proses yang terdiri dari tiga item yang dinilai yaitu Tepat sasaran atau tidak, Tepat guna atau tidak dan Efisiensi atau tidak. maka kedepannya harus lebih diperhatikan kembali pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan sesuai dengan tujuan organisasi dan individu yang ada didalam organisasi.

- 3 Untuk Indikator Outputs (hasil) kategori penilaian responden pegawai pemerintah nagari berada pada kategori cukup Baik, dan untuk kategori penilaian responden BAMUS Nagari terhadap Outputs (hasil) cukup Baik dan untuk kategori penilaian responden Masyarakat terhadap Outputs (hasil) juga cukup Baik. Tetapi jika dari ketiga responden digabungkan dalam tabel rekapitulasi indikator dari Outputs (hasil) dimana pada tabel tersebut penilaian dikategorikan cukup Baik. Maka oleh karena itu, untuk tingkat Outputs (hasil) yang terdiri dari empat item yang dinilai yaitu Tepat tidaknya sasaran

yang ditujui, Berapa besar sasaran yang tercakup, Seberapa banyak kelompok sasaran yang tertangani dan Seberapa besar kelompok yang terlibat. maka kedepannya harus lebih diperhatikan kembali tingkat keberhasilan Rencana Kerja Pembangunan sesuai dengan tujuan organisasi dan individu yang ada didalam organisasi.

- 4 Untuk Indikator Outcome (dampak) kategori penilaian responden pegawai pemerintah nagari berada pada kategori cukup Baik, dan untuk kategori penilaian responden BAMUS Nagari terhadap Outcome (dampak) cukup Baik dan untuk kategori penilaian responden Masyarakat terhadap Outcome (dampak) juga cukup Baik. Tetapi jika dari ketiga responden digabungkan dalam tabel rekapitulasi indikator dari Outcome (dampak) dimana pada tabel tersebut penilaian dikategorikan cukup Baik. Maka oleh karena itu, untuk tingkat Outcome (dampak) yang terdiri dari Tiga item yang dinilai yaitu Ada atau tidak perubahan pada target/sasaran, Seberapa besar perubahan kelompok sasaran dan Seberapa signifikan perubahan yang terjadi pada kelompok sasaran dibandingkan dengan tujuan yang ingin dicapai. maka kedepannya harus lebih diperhatikan kembali tingkat Pemanfaatan Rencana Kerja Pembangunan bagi masyarakat sesuai dengan tujuan organisasi dan individu yang ada didalam organisasi.

Saran

1. Perlu tersedianya sumber daya manusia yang memadai, baik aparatur Pemerintahan maupun masyarakat untuk mendukung pelaksanaan pemerintahan Nagari dalam mencapai tujuan dari pembangunan. sehingga kedepan kualitas program yang akan dirumuskan dalam rencana Kerja pembangunan benar-benar menyentuh semua aspek kebutuhan masyarakat setempat. Baik dari segi pembangunan infrastruktur, pemberdayaan SDA (seperti: pembentukan BUM Nagari) dan pembinaan masyarakat baik dibidang pendidikan, budaya serta pembinaan ekonomi kreatif masyarakat.
2. Didalam mewujudkan keberhasilan sebuah kebijakan atau program-program yang telah dirumuskan diperlukan sebuah pengumpulan data dan analisis terhadap tingkat keberhasilan program itu sendiri. Dari aspek ini diharapkan pemerintah kenagarian indrapura tengah benar-benar meng-Evaluasi setiap tingkatan keberhasilan pelaksanaan dari Rencana Kerja Pembangunan yang telah dirumuskan. Hasil penilaian melalui proses ini diharapkan menjadi dasar formal untuk membuat keputusan oleh pemerintah kenagarian indrapura tengah kedepannya.
3. Didalam melakukan evaluasi rencana Kerja Pembangunan, penentuan tujuan evaluasi akan selalu berkenaan dengan apa yang diharapkan dari pelaksanaan suatu evaluasi itu sendiri, yaitu output (hasil) Terlepas dari bentuk dan pendekatan yang akan dilakukan. Pengkajian tingkat keberhasilan pelaksanaan program sangatlah penting dilakukan oleh pemerintah kenagarian indrapura tengah, menurut penulis metode MUSRENBANG sangat eektif sebagai wadah untuk pengkajian tingkat keberhasilan program yang dirumuskan. Diharapkan setiap Forum MUSRENBANG kedepan musyawarah dan mufakat terlaksana dengan baik serta masukan-masukan dari berbagai pihak dapat menjadi acuan atau pertimbangan pemerintah nagari dalam membuat kebijakan.

4. Evaluasi rencana kerja pembangunan tidak hanya terdiri dari analisa kuantitatif atas dampak pelaksanaan kebijakan, tetapi juga mencakup penjelasan mengenai ketercapaian atau tidak ketercapaian dari kebijakan rencana kerja pembangunan itu sendiri. Indikator ini menunjukkan pengaruh, baik itu positif maupun negatif, yang ditimbulkan akibat pelaksanaan kebijakan atau program atau kegiatan dan asumsi yang telah digunakan. Menurut penulis analisa terhadap pengaruh dari Pelaksanaan Kebijakan atau program sangat efektif menggunakan Rumusan : Program, Reaksi dan Solusi didalam pencapaian setiap kebijakan yang tertuang dalam Rencana Kerja pembangunan dikedua Kabupaten Indragiri Tengah.

Daftar Kepustakaan

- Adisubrata, Winarya Surya, 2002. *Otonomi Daerah Diera Reformasi*. Yogyakarta, UPP AMP YKPN.
- Chairiyah, Sri Zul, 2008. *Nagari Minang Kabau Dan Desa Disumatra Barat*. Sumatra Barat, Kaukus Perempuan Penyelenggara Pemilu Sumatra Barat (KP3SB)
- Indiahono, Dwiyanto, 2009. *Kebijakan Publik "Berbasis Dynamic Policy Analysis"*. Yogyakarta :Gava Media
- Kumorotomo Wahyudi, 2013. *Etika Administrasi Negara*. Rajawali Pers
- Mardalis, 2014. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta:PT Bumi Aksara
- Mufis, Ali, 2009. *Pengantar Ilmu Administrasi Negara*. Jakarta: Universitas Terbuka
- Nawawi, Zaidan. 2013. *Manajemen Pemerintahan*. Jakarta: PT.Gravindo Persada
- Nurcholis, Hanif.2007. *Teori Dan Praktek Pemerintahan Dan Otonomi Daerah*. Jakarta : Grasindo
- Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, 2004. *Buku Saku "Tugas Pokok Dan Fungsi Aparatur Pemerintahan Nagari"*. Painan: Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
- Siagian, Sondang P, 2012. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: Bumi Aksara
- Sinambela, Lijan Poltak, 2014. *Reformasi Pelayanan Publik "Teori Kebijakan Dan Implementasi"*. Jakarta: PT.Bumi Aksara
- Sopiah, 2008. *Prilaku Organisasi*. Yogyakarta: CV.ANDI OFFESET
- Sjafrizal, 2014. *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Sugiyono, 2010. *Metode Penelitian Administrasi Dilengkapi Dengan Metode R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sunyoto, Danang, 2013. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT Buku Seru
- Syafiie, Inu Kencana, 2011. *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (SANRI)*. Jakarta: PT.Bumi Aksara
- Syafri, Wirman, 2012. *Studi Tentang Administrasi Publik*. Jakarta: Erlangga
- Tim Penyusun. 2013. *Buku Pedoman Penulisan*. Badan Penerbit FISIPOL Pekanbaru : UIR

Defrizon Indra
Zulkifli

PUBLIKA, Vol 3, No. 1 Hal. 13-41 (2017)

Tarigan, Robinson, 2012. *Perencanaan Pembangunan Wilayah*. Jakarta: PT. Bumi Aksara

UU No.32 Tahun 2004 Tentang *Otonomi Daerah*

Thoha, Miftah, 2008. *Ilmu Administrasi Publik Kontenporer*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group

UU No.6 Tentang Desa Tahun 2014 Tentang *Desa*

Widjaja, HAW, 2002. *Otonomi Daerah Dan Daerah Otonom*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 Tentang Perencanaan Pembangunan Desa

Wirawan, 2011. *Evaluasi "Teori, Model, Standar, Aplikasi Dan Proses"*. Jakarta, Rajawali Pers

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2007 Tentang Pendataan Program Pembangunan Desa / Kelurahan

Zulkifli, 2009. *Fungsi-Fungsi Manajemen*. Pekanbaru, UIR Pers

Peraturan Daerah Pesisir Selatan No.08 Tahun 2007 "Kewenangan Pemerintah Nagari

Zulkifli, 2005. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi Dan Manajemen*. Pekanbaru : UIR Press

RPJM 2013-2017 Kenagarian Indrapura Tengah Kecamatan Pancung Soal

Zainuddin, Musyair, 2008. *Implementasi Pemerintah Nagari Berdasarkan Hak Asal Usul Adat Minangkabau*. Yogyakarta: Ombak

Sumber website :

Irhash A. Shamad, Refleksi Sejarah Pergulatan Etnisitas di Pemerintah Daerah Sumatera Barat (2) : Gubernur Azwar Anas (1977-1987), <http://irhashshamad.blogspot.com/2010/03/refleksi-sejarah-pergulatan-etnisitas.html>. diakses pada 28 Agustus 2015; Pukul 21.30 WIB.

Dokumentasi

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945